



Volume 04, Isu 01, Tahun 2024, ISSN: 2808-7089 (Online), doi: 10.21274

Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)

Faculty of Islamic Economic and Business
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: <http://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/sosebi>

REFLEKSI KETAHANAN EKONOMI PASCA PANDEMI: Menggaungkan Relevansi Ekonomi Pancasila Bagi Generasi Milenial

Agus Danugroho^{1*}

¹Mahasiswa Doktoral Ilmu Sosial, Universitas Airlangga

*Email: agus.danugroho-2023@fisip.unair.ac.id



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Pancasila, sebagai dasar ideologi Republik Indonesia, memiliki relevansi yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Namun, dalam era globalisasi yang didominasi oleh generasi milenial, relevansi ekonomi Pancasila sering kali terabaikan. Tulisan ini bertujuan untuk menggaungkan kembali relevansi ekonomi Pancasila bagi generasi milenial melalui pendekatan akademis dan ilmiah pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji nilai-nilai ekonomi Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern yang dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan, semakin relevan dan diterapkan dalam berbagai bentuk usaha dan inovasi. Generasi milenial menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dan berperan penting dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman dan penerapan ekonomi Pancasila oleh milenial dapat menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila; Milenial; Pasca Pandemi Covid-19.

Abstract: Pancasila, as the ideological foundation of Indonesia, holds deep relevance in various aspects of life, including the economy. However, in an era of globalization dominated by the millennial generation, the relevance of Pancasila's economic principles is often overlooked. This paper aims to reaffirm the relevance of Pancasila's economic principles for millennials through an academic and scientific approach in the post-pandemic Covid-19 era. This study employs qualitative methods with a descriptive-analytical approach to examine the economic values of Pancasila and how these values can be implemented in the dynamic context of the modern economy. The research findings show that Pancasila values, such as social justice, humanity, and togetherness, are increasingly relevant and applied in various forms of enterprises and innovations.

Millennials demonstrate a high capacity for adaptation and play a crucial role in building a more inclusive and sustainable economy. This study emphasizes that the understanding and application of Pancasila's economic principles by millennials can be key to strengthening national economic resilience and achieving prosperity for all Indonesian people.

Keywords: Pancasila Economy; Millennials; Post-Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, pandemi Covid-19 merebak dalam skala global. Salah satu negara yang juga terkena dampaknya adalah Indonesia. Pandemi ini berdampak besar pada setiap bidang masyarakat, termasuk ekonomi yang berkontribusi pada krisis ekonomi global saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia, 2020), PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% pada triwulan II 2020. Bahkan pada triwulan I, penyusutannya mencapai 6,13% yang merupakan kinerja ekonomi terburuk sejak 1999. International Monetary Fund dan Bank Dunia bahkan pada saat pandemi membuat prediksi bahwa ekonomi global akan mengalami resesi yang parah pada akhir kuartal pertama tahun 2020 (Internatioal Monetary Fund, 2020).

Indonesia adalah bangsa yang diprediksi akan mengalami resesi dan mungkin berada di ambang krisis. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus merespon dengan cepat dan tepat. Tindakan terbaik adalah stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang secara aktif akan berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Resesi membawa ketidakpastian di sejumlah bidang, yang didorong oleh ekonomi yang lemah dan kesehatan yang menurun. Penyebaran virus yang cepat menimbulkan krisis kesehatan, dan tatanan kehidupan yang mapan di masyarakat (Zhang et al., 2023). Di sisi lain, resesi dan akibatnya berdampak signifikan terhadap perekonomian, dengan meningkatnya tingkat pengangguran.

Pasar kerja yang diperkirakan akan pulih kembali pada tahun 2023 belum terpengaruh oleh pemulihan ekonomi di banyak negara. Pada kenyataannya, jika kita mengikuti benang merah, kehilangan pekerjaan menimbulkan risiko serius bagi kemampuan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar. BPS (Badan Pusat Statistik, 2022) menyebut hal itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 sebesar 7,07 persen, menandakan Indonesia telah keluar dari perlambatan ekonomi akibat pandemi. Jika kita membalikkan stagnasi ekonomi yang disebabkan oleh berkurangnya mobilitas orang akibat berbagai inisiatif pemerintah saat itu. Hal ini tentu dirasakan merugikan masyarakat yang terlihat dari meningkatnya mobilitas masyarakat dan nilai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Ada berbagai solusi yang diusulkan untuk mengatasi berbagai efek pandemi pasca-reseksi, tetapi yang paling penting tidak diragukan lagi adalah yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat (Djalante et al, 2020). Salah satu langkah kunci untuk menata kembali perekonomian Indonesia adalah pertumbuhan sektor digital yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan negara dari wabah Covid-19. Perubahan perilaku masyarakat yang lebih menyukai penggunaan platform digital di berbagai industri menjadi faktor lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital saat ini. Lintasan optimis pertumbuhan ekonomi digital konsisten dengan tren di dunia investasi. Digitalisasi yang dapat dijalankan dengan baik oleh generasi milenial ini tentunya akan membawa dampak yang baik jika diiringi dengan sistem yang tepat (Aprilyautami et al., 2024a). Pemahaman sistem ekonomi Pancasila tentunya dapat ditanamkan pada generasi milenial sehingga mereka dapat mengelaborasinya dengan kreativitas digitalisasi sehingga dapat juga akan mendukung ketahanan ekonomi Bangsa Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Adapun untuk memperkuat penelitian ini, beberapa penelitian sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penulis merangkum penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang mengandung kesamaan oleh tema penulis. Ketahanan ekonomi pasca-pandemi adalah konsep multifaset yang mencakup berbagai dimensi seperti konstruksi struktural organisasi, strategi manajemen risiko, ekosistem ketidakpercayaan, dan upaya kebangkitan ekonomi. Studi menekankan pentingnya elemen seperti fleksibilitas budaya organisasi, keselamatan, dan keandalan dalam meningkatkan ketahanan organisasi (Vargas-Hernandez & Vargas-González, 2023). Selain itu, peran ketahanan risiko, manajemen risiko, dan strategi kelangsungan bisnis dalam organisasi, terutama di sektor-sektor seperti industri makanan, telah disorot (Karlsson et al., 2023). Munculnya ekosistem ketidakpercayaan yang unik secara online pasca-pandemi menimbulkan tantangan bagi skema mitigasi, menunjukkan perlunya pesan 'glokal' yang memadukan topik yang berbeda dan skala geografis untuk strategi yang lebih efektif (Latifah et al., 2023). Selain itu, upaya membangun ketahanan ekonomi pasca-pandemi, seperti melalui filantropi Islam dan inisiatif ekonomi hijau, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan sambil mempertimbangkan dampak lingkungan (Özsoy & Gürler, 2023). Tantangan ekonomi global yang diperburuk oleh pandemi menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dalam akses perawatan kesehatan dan distribusi pendapatan antar negara untuk pemulihan pasca-pandemi yang lebih tangguh (Lucero, 2023). Berdasarkan rangkuman penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait ekonomi Pancasila, hal itu merupakan celah bagi peneliti untuk mengembangkan riset terkait ekonomi Pancasila dalam mewujudkan ketahanan ekonomi.

KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Pancasila, sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Sistem ini menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, serta mendukung kemandirian ekonomi nasional. Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menawarkan pendekatan yang holistik dan berkeadilan dalam mengelola perekonomian nasional. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai dasar, Ekonomi Pancasila berusaha menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia (Danugroho, 2022). Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

Jika kita bedah mendalam sistem ekonomi Pancasila berkaitan dengan butir-butir yang ada dalam sila Pancasila. Ekonomi Pancasila yang berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar dalam pengelolaan ekonomi. Dalam sistem ini, ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, melainkan juga pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Praktik ekonomi harus menghindari eksploitasi dan mempromosikan kesejahteraan yang merata bagi semua. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Sang Pencipta dan generasi mendatang.

Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengharuskan adanya distribusi kekayaan yang adil dan tidak adanya kesenjangan ekonomi yang mencolok. Dalam praktiknya, ekonomi Pancasila mendorong adanya program-program pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan. Selain itu, sistem ekonomi ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan beradab.

Prinsip Persatuan Indonesia dalam Ekonomi Pancasila menggarisbawahi pentingnya integrasi ekonomi nasional yang mencakup semua wilayah Indonesia. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi antar daerah dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi ekonomi yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi, serta mendorong investasi yang merata di seluruh

wilayah Indonesia. Dengan demikian, persatuan nasional dapat terjaga melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata.

Ekonomi Pancasila menjunjung tinggi prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap keputusan ekonomi diambil melalui proses musyawarah dan mufakat. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, ekonomi Pancasila mengutamakan pengelolaan ekonomi yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, termasuk para pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Partisipasi ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip keadilan sosial merupakan inti dari Ekonomi Pancasila. Sistem ini berusaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengutamakan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi. Dalam praktiknya, hal ini diterjemahkan melalui berbagai program kesejahteraan sosial, seperti subsidi bagi kelompok miskin, peningkatan akses layanan publik, dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, Ekonomi Pancasila juga mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Bagi generasi milenial, yang merupakan generasi penerus bangsa, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila menjadi sangat krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat (Akbar & Ghufro, 2019). Generasi milenial, juga dikenal sebagai Generasi Y, adalah kelompok demografis yang lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI, 2018). Mereka tumbuh di era di mana teknologi digital, internet, dan media sosial mulai berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Milenial sering digambarkan sebagai generasi yang sangat terhubung, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Mereka memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka terhadap keragaman, memiliki pandangan global, dan lebih terlibat dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Di tempat kerja, milenial dikenal karena keterbukaan mereka terhadap fleksibilitas, keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, serta keinginan untuk mencari makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Meskipun sering dianggap sebagai generasi yang ambisius dan optimis, milenial juga menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, biaya pendidikan yang tinggi, dan persaingan di pasar kerja.

yang ketat (Maulana & Danugroho, 2023). Dalam konteks budaya dan sosial, milenial memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dan inovasi, serta menjadi penggerak utama dalam banyak tren dan perubahan di masyarakat modern.

Pentingnya memperkenalkan dan menggaungkan relevansi Ekonomi Pancasila kepada generasi milenial tidak hanya sebagai upaya pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Generasi milenial, dengan karakteristiknya yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi, memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian berbasis Pancasila. Dengan dukungan teknologi digital, prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila dapat diaplikasikan melalui berbagai platform ekonomi kreatif dan start-up yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Haryati & Junaidi, 2023). Misalnya, konsep koperasi digital yang berbasis pada gotong royong dan keadilan sosial dapat menjadi salah satu implementasi nyata dari Ekonomi Pancasila dalam konteks modern. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai Ekonomi Pancasila perlu disesuaikan dengan bahasa dan medium yang akrab dengan generasi milenial, seperti melalui media sosial, webinar, dan aplikasi edukasi.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Generasi milenial, dengan semangat kolaborasi dan jejaring sosial yang kuat, dapat memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif (Umam, 2017). Mereka dapat mendorong inovasi sosial yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas, serta mengembangkan model bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan partisipasi aktif generasi milenial dalam ekonomi berbasis Pancasila akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi nasional, penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila juga harus diintegrasikan dalam kebijakan publik dan regulasi pemerintah (Ayunda et al., 2022). Generasi milenial, sebagai bagian dari warga negara yang kritis dan berdaya, dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila (Tjakrawerdaja & Soedarno, 2021). Keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui partisipasi politik maupun inisiatif masyarakat sipil, akan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial dan kemandirian ekonomi.

Selain itu, pendidikan tentang Ekonomi Pancasila harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan formal dan informal yang menekankan pada pemahaman kritis dan aplikasi praktis dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi sehari-hari akan membekali generasi milenial dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut (Salim, 2019). Dengan demikian, generasi milenial tidak hanya akan menjadi penerus bangsa yang memahami sejarah dan filosofi Pancasila, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis dan kehidupan sehari-hari.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital, relevansi Ekonomi Pancasila bagi generasi milenial harus ditekankan sebagai landasan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi memberikan arah yang jelas bagi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut, generasi milenial akan mampu menghadapi dinamika ekonomi global dengan lebih bijaksana dan beretika, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Teori Kapital Sosial, yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu dan Robert Putnam, menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dalam konteks Ekonomi Pancasila, teori ini relevan karena Pancasila menekankan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan. Kapital sosial dapat memperkuat basis sosial Ekonomi Pancasila, dengan generasi milenial sebagai aktor kunci dalam membangun dan memelihara jaringan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama (Mudiarta, 2017).

Generasi milenial, dengan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital, dapat memperluas dan memperkuat jaringan sosial melalui platform media sosial dan aplikasi berbasis komunitas. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk berkolaborasi secara lebih efektif, berbagi informasi, dan mendukung inisiatif ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila (Adiyanto, 2021). Misalnya, melalui kelompok-kelompok diskusi online, komunitas berbagi sumber daya, dan inisiatif crowdfunding, generasi milenial dapat mendorong usaha bersama yang mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi.

Kapital sosial juga berperan dalam membangun kepercayaan dan norma-norma yang mendukung kerjasama dan solidaritas. Dalam Ekonomi Pancasila, kepercayaan antara individu dan komunitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan

merata (Hidayat, 2017). Generasi milenial dapat memperkuat kepercayaan ini dengan mengembangkan praktik bisnis yang transparan dan beretika, serta dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial dalam setiap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, teori kapital sosial menekankan pentingnya norma-norma yang mendukung kerjasama dan kolaborasi (Sultan & Suryanto, 2023). Dalam Ekonomi Pancasila, norma-norma gotong royong dan solidaritas sosial menjadi landasan utama. Generasi milenial dapat menginternalisasi dan menyebarkan norma-norma ini melalui pendidikan, kampanye sosial, dan program-program pengembangan komunitas. Dengan demikian, norma-norma Pancasila dapat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari generasi milenial, mendorong mereka untuk berperilaku secara kolektif dan bertanggung jawab sosial.

Teori kapital sosial juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dalam komunitas. Dalam konteks Ekonomi Pancasila, partisipasi aktif generasi milenial dalam berbagai kegiatan ekonomi berbasis komunitas akan memperkuat kohesi sosial dan mempromosikan keadilan sosial (Lendesang, 2014). Generasi milenial dapat terlibat dalam koperasi, inisiatif ekonomi lokal, dan proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Partisipasi aktif ini tidak hanya memperkuat kapital sosial, tetapi juga membantu mewujudkan cita-cita Pancasila dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur (Agus Danugroho, 2022).

Kapital sosial berperan dalam menciptakan jaringan dukungan yang luas dan beragam. Dalam Ekonomi Pancasila, jaringan dukungan ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Generasi milenial dapat membangun jaringan ini melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (A. Danugroho, 2020). Dengan membangun dan memelihara jaringan dukungan yang kuat, generasi milenial dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, teori kapital sosial memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dan mengkaji relevansi Ekonomi Pancasila bagi generasi milenial. Melalui penerapan prinsip-prinsip kapital sosial, generasi milenial dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Pancasila bagi generasi milenial di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi krusial untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana generasi milenial memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam kehidupan mereka (Sugiono, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan generasi milenial yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur yang relevan, laporan penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan ekonomi Pancasila dan generasi milenial. Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara dengan berbagai informan, observasi langsung, serta analisis dokumen atau arsip. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi atau ketidakkonsistenan dalam informasi yang diperoleh, sehingga dapat menguatkan validitas temuan. Selain itu, *member check* dilakukan dengan meminta responden untuk meninjau kembali hasil wawancara dan diskusi untuk memastikan akurasi dan keabsahan informasi yang diperoleh (Creswell, 2016). Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila bagi generasi milenial, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penguatan ekonomi berlandaskan Pancasila di era digital ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Pancasila dalam Perekonomian Nasional Pasca Pandemi Covid-19

Pancasila merupakan satu-satunya asas penuntun berbangsa, maka pertumbuhan bangsa harus dipandang sebagai proses transformasi menuju masyarakat Pancasila. Tujuan pembangunan nasional adalah agar kelima sila Pancasila terwakili dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Agar kehidupan ekonomi sejalan dengan tujuan yang dicanangkan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka semangat seluruh bidang kehidupan ekonomi dan penyelenggaraan perekonomian harus nyata. Demokrasi ekonomi, di mana kesejahteraan masyarakat didahulukan dari kepentingan satu orang, harus menjadi landasan bagaimana ekonomi diatur (Aprilyautami et al., 2024b). Efek negatif pada masyarakat jika hal ini tidak tercapai termasuk penindasan terhadap rakyat dan konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok kecil individu.

Prinsip dasar sistem ekonomi Indonesia terkait dengan prinsip keadilan, nasionalisme ekonomi, dan demokrasi ekonomi yang diekspresikan dalam ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila. Bung Hatta-lah yang pertama kali menggunakan istilah sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila adalah sistem yang bertumpu pada masyarakat yang kekuatan rakyatnya adalah ekonomi (Marsudi & Purbasari, 2022). Selain itu, Bung Hatta mengusulkan konsep koperasi, yang menurutnya bentukan niaga berbasis kekerabatan merupakan ciri sistem ekonomi pancasila. Di masa krisis moral ini, penting bagi kita untuk mencermati perilaku diri sendiri dan mengingat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika kemanusiaan dan ketuhanan dalam berperilaku, berpikir, serta bertindak sebagai makhluk ekonomi atau *homo economicus*, agar kita tidak mengabaikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam praktik ekonomi kita.

Dasar negara Pancasila sudah mengandung etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945, ekonomi Pancasila dirancang berdasarkan konsep kekeluargaan dan persatuan (T. Nugroho, 2011). Dalam Pancasila, orang berjuang untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial mereka. Dari pembacaan yang seksama terhadap Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 terlihat jelas bahwa sistem perekonomian Indonesia didasarkan atas konsep kekeluargaan. Gagasan kekerabatan dipandang sebagai gagasan umum yang memiliki signifikansi dalam lingkungan saat ini, yang meliputi persaudaraan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perekonomian tidak dipandang sebagai manifestasi sistem persaingan liberal, melainkan sebagai cerminan kewajiban sosial yang berdimensi moral dan rasa kebersamaan.

Penerapan ilmu ekonomi kerakyatan akan lebih berhasil jika diajarkan di pada generasi milenial saat ini. Hal ini akan memberikan karakter nasionalisme yang akan mengembangkan rasa kekeluargaan, yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan dan memiliki etika keadilan. Sayangnya, ini belum diajarkan secara penuh dalam kehidupan generasi milenial. Menurut Mubyarto (Mubyarto, 1992), *homo-economicus* adalah kapitalis barat yang hanya berusaha memaksimalkan keuntungan dan kenikmatan dari barang dan jasa yang sempit. Namun kenyataannya, pendidikan ekonomi kita justru menjauhkan anak bangsa Indonesia dari

nilai-nilai fundamental ekonomi Pancasila. Pendidikan ekonomi di Indonesia didambakan untuk menjadikan anak bangsa sebagai sumber daya manusia bagi pelaku ekonomi yang bangga mengamalkan nilai-nilai ekonomi berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Pentingnya Peran Generasi Milenial dalam Penerapan Ekonomi Pancasila

Era industri 5.0 yang dibangun di atas masyarakat super cerdas dan secara mendasar mengarahkan keseimbangan antara komunitas manusia dan otomasi guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sudah dikenal luas di Jepang. Jika pandangan ke depan dan sikap kebijakan yang tepat tidak diambil, maka keberadaan revolusi industri 5.0 ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara yang tidak siap akan transformasi yang dibawanya.

Generasi milenial merupakan sekelompok individu yang bertugas membawa perubahan sehingga bangsanya dapat menjadi kompetitif (Burhannuddin & Danugroho, 2021). Untuk dapat menghadapi dinamika persaingan di era perubahan saat ini, sumber daya manusia tidak diragukan lagi merupakan hal yang krusial. Untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang diberikan pada masa transisi ini, kaum muda harus terlibat. Karena mereka adalah usia yang lebih produktif, generasi muda tentu saja mudah mengakses teknologi dan melihatnya sebagai peluang yang baik untuk meluncurkan kreativitas mereka sendiri.

Generasi milenial, yang lahir antara awal 1980-an hingga awal 2000-an, memiliki peran penting dalam penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia. Mereka tumbuh di era digital dengan akses informasi yang luas, serta memiliki karakteristik inovatif dan adaptif. Generasi ini mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang ekonomi. Potensi mereka sebagai agen perubahan sangat signifikan, terutama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa, milenial dapat membawa nilai-nilai moral dan etika ke dalam dunia bisnis dan ekonomi. Mereka cenderung lebih peka terhadap isu-isu seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam praktik bisnis, milenial dapat mendorong terciptanya ekonomi yang berintegritas dan beretika. Selain itu, mereka dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan usaha-usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab oleh milenial dapat dilihat dari komitmen mereka terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Generasi ini sering

terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui *startup* dan usaha kecil menengah, milenial dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyediakan produk atau layanan yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial.

Nilai Persatuan Indonesia dalam ekonomi Pancasila dapat diwujudkan oleh milenial melalui upaya mereka untuk memperkuat ekonomi lokal dan nasional. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, mereka dapat menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, mengurangi disparitas ekonomi antar daerah, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Program-program yang mengutamakan produk lokal dan pemberdayaan komunitas setempat merupakan contoh nyata bagaimana milenial dapat berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui ekonomi.

Generasi milenial juga dapat memajukan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Mereka dikenal lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan platform digital, milenial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi. Mereka mendorong partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keterbukaan dan partisipasi ini penting untuk menciptakan ekonomi yang adil dan demokratis.

Akhirnya, dalam upaya mencapai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, milenial dapat berperan sebagai agen perubahan melalui berbagai inovasi sosial dan ekonomi. Mereka dapat mengembangkan berbagai model bisnis yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi, milenial dapat mengembangkan platform yang memberikan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi semua orang. Upaya-upaya ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Secara keseluruhan, peran generasi milenial dalam penerapan ekonomi Pancasila sangatlah penting. Dengan karakteristik inovatif, adaptif, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, mereka dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui upaya kolaboratif dan partisipatif, milenial memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi ekonomi Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Jika generasi muda mengandalkan kemampuan mereka untuk memahami teknologi, mereka akan dapat membawa perubahan pada semua aspek termasuk pada roda perekonomian nasional (Agus Danugroho, Umamah, Marjono, Sumardi, & Pratama, 2020). Nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor terkait produksi lainnya ditingkatkan oleh pengusaha. Selain itu, merekalah yang memperkenalkan inovasi, perubahan, dan ide-ide segar. Peluang usia milenial Indonesia bisa datang dengan sistem ekonomi kerakyatan. Generasi milenial saat ini harus dikenalkan dengan ekonomi pancasila. Karena diyakini dengan memahami gagasan ini, para generasi milenial akan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang doktrin Pancasila.

Ekonomi Pancasila adalah strategi ekonomi yang pada akhirnya menemukan keseimbangan setelah melakukan ayunan dari kiri ke kanan (Saputra & Saoqillah, 2017). Kiri ditandai dengan meningkatnya campur tangan pemerintah dalam kerangka yang terorganisasi secara terpusat, sedangkan kanan dipandang sebagai kemandirian. Ekonomi Pancasila dapat disimpulkan sebagai suatu sistem ekonomi pasar yang dikelola atau dikendalikan oleh pemerintah. Pengertian ekonomi pancasila harus diciptakan dan dipelajari oleh semua orang untuk dapat menangani semua sumber daya yang dimilikinya, karena kebutuhan ekonomi merupakan komponen dasar dari nilai-nilai sosial dalam kehidupan bangsa.

Implikasi Penerapan Ekonomi Pancasila Bagi Ketahanan Ekonomi

Munculnya era globalisasi hampir menghilangkan batas-batas antar negara. Prasiasa (2022) menyatakan bahwa musuh globalisasi tidak perlu dilawan. Tapi meski begitu, jika kita tidak ingin dijarah, kita harus ekstra hati-hati. Tentu saja, berdasarkan pernyataan ini, globalisasi memiliki efek positif dan negatif. Pengaruh globalisasi sudah terasa, terutama dalam bidang ekonomi. Ideologi kapitalis yang sangat individualistis dan mendukung gagasan keuntungan semata niscaya akan mengikuti datangnya globalisasi.

Menurut Mubyarto (1969), sistem ekonomi suatu negara haruslah yang menguntungkan seluruh rakyat, berbeda dengan sistem ekonomi saat ini yang hanya menguntungkan korporasi besar. Berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945, ekonomi pancasila dirancang berdasarkan konsep kekeluargaan dan persatuan. Dalam Pancasila, orang berjuang untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial mereka. Dari pembacaan yang seksama terhadap Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 terlihat jelas bahwa sistem perekonomian Indonesia didasarkan atas konsep kekeluargaan.

Gagasan kekerabatan dipandang sebagai gagasan umum yang memiliki signifikansi dalam lingkungan saat ini, yang meliputi persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan (Hastangka, 2012). Oleh karena itu, perekonomian tidak dipandang sebagai manifestasi sistem persaingan liberal, melainkan sebagai cerminan kewajiban sosial yang berdimensi moral dan rasa kebersamaan. Pada hakikatnya, sistem ekonomi kerakyatan harus dilaksanakan oleh negara. Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 keduanya memperjelas hal ini.

Diantara fungsinya adalah sebagai berikut, (1) memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, (2) memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penghidupan, (3) memastikan bahwa tanah, air, (4) dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kepentingan rakyat, (5) mengembangkan BUMN, dan (6) mengembangkan koperasi. Ilmu ekonomi kerakyatan pada hakekatnya membahas semua hak dalam hal kebijakan-kebijakan yang diprioritaskan untuk mendukung rakyat (Tarmini, 1992). Solidaritas sosial ekonomi, yang mengacu pada pengarusutamaan pemerintah dan barang koperasi di era globalisasi adalah cara lain untuk mengekspresikan ekonomi rakyat.

Masyarakat Indonesia harus bisa menerima teknologi, tetapi tidak boleh merusak nilai-nilai, moralitas, atau etika budaya negara. Masyarakat Indonesia harus mulai mencermati setiap risiko atau gangguan akibat penggelaran ekonomi digital, mengantisipasinya, dan melakukan upaya pemulihan yang efektif, dan berjangka panjang (Torii, 2015). Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi digital harus mempertimbangkan kondisi geografi Indonesia untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, kemakmuran, berdaya saing tinggi, dan tumbuh stabil dan berkelanjutan.

Mengikuti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan infrastruktur, dan aksesibilitas teknologi yang diperlukan, ekonomi mandiri muncul. Kemandirian ekonomi Indonesia akan sangat erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi yaitu suatu kondisi dinamis yang ditandai dengan keuletan dan ketangguhan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang mendasarkan pada basis kekeluargaan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang merupakan ciri khas budaya bangsa. Konsep kekeluargaan dalam Pancasila menekankan pentingnya kerjasama, kebersamaan, dan saling menghargai antara individu dan

kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam penerapan sistem ekonomi yang mewujudkan ekonomi Pancasila, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Memperkenalkan kembali ekonomi Pancasila adalah tindakan tepat pada masa pasca pandemi Covid-19. Jika disandingkan dengan kemampuan inovasi digital, sistem ekonomi Pancasila yang dikenalkan pada generasi milenial akan berdampak lebih besar pada pemulihan perekonomian bangsa. Suatu negara yang menekankan kemampuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meminimalkan ketergantungannya pada negara lain dengan berkembang menjadi negara yang lebih produktif akan dikatakan memiliki kemandirian ekonomi. Perkembangan ekonomi digital seharusnya dapat membantu pertumbuhan barang dan jasa dalam negeri serta peningkatan standar kemandirian ekonomi di tingkat nasional. Penanaman sistem ekonomi Pancasila bagi generasi milenial yang akan digunakan untuk membangun perekonomian nasional di tengah tuntutan digitalisasi akan berdampak secara langsung terhadap ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, A. (2021). *Habitus dan Praktik Aktor dalam Arena Pemajuan Kebudayaan. Biokultur*. <https://doi.org/10.20473/bk.v10i1.27799>
- Akbar, M. A., & Ghufro, Moh. I. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2868>
- Aprilyautami, A., Safitri, V., Nasution, A. F., & Vazira, K. (2024). Demokrasi Pancasila. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1824>
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., Ariska, Y. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Strategi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi di Era Modern Berbasis Pancasila. *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16401>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. *Statistik Indonesia 2022*.
- BPS Indonesia. (2020). BPS Indonesia. *In Statistik Indonesia 2020*.
- Burhannuddin, Moh. A., & Danugroho, A. (2021). Pesta Rakyat ditengah Krisis: Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Proceeding*

International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference.
<https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.18>

Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed.* Pustaka Belajar.

Danugroho, A. (2020). Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro Pada Era Modern. *Jurnal Sindang*, 2(1), 1–7.

Danugroho, A. (2022). *Mengartikan Ketahanan Nasional.* Pustaka Aksara.
<https://www.pustakaaksara.co.id/view/73>

Danugroho, A., Umamah, N., Marjono, Sumardi, & Pratama, A. R. (2020). Aceh Tsunami and Government Policy In Handling It: A Historical Study A Historical Study. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012140>

Djalante et al. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 202. *Progress in Disaster Science*, 6.

Haryati, H., & Junaidi, H. (2023). Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains.*
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16676>

Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. In *Filsafat*.

Hidayat, S. (2017). Teori Sosial Pierre Bourdieu dan Sumbangannya Terhadap Penelitian Sastra (Pierre Bourdieu's Social Theory and Its Contribution Toward Literary research). *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra.*
<https://doi.org/10.26610/metasastra.2010.v3i1.43-52>

International Monetary Fund. (2020). World Economic Outlook, January 2020, Tentative Stabilization, Sluggish Recovery? In *World Economic Outlook*.

Karlsson, P. S., Offord, M., & Enang, I. (2023). Guest editorial: Resilience in a post-pandemic world – has anything changed? *Continuity & Resilience Review*, 5(2), 113–115.
<https://doi.org/10.1108/CRR-07-2023-045>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI. (2018). *Profil Generasi Milenial Indonesia.* KemenPP-PA.

- Latifah, E., Fithrotin, F., & Farokhah, F. A. (2023). Islamic Philanthropy-Based Green Economy Assistance to Build Post-Pandemic Resilience. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(1), 21–29.
<https://doi.org/10.21776/jiscos.03.1.03>
- Lendesang, Y. (2014). Social Capital Analysis in the Road Children Community in Pagi Market, Samarinda City, East Kalimantan (In Indonesian Language). *EJournal Ilmu Sosiatri*.
- Lucero, C. R. (2023). Post-Pandemic Risks and Its Influence on Enterprise Resiliency. *Open Journal of Business and Management*, 11(03), 920–944.
<https://doi.org/10.4236/ojbm.2023.113050>
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*.
<https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>
- Maulana, N., & Danugroho, A. (2023). Pemaknaan kembali Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesanti Negara Indonesia. *Journal of Humanities and Civic Education*.
<https://doi.org/10.33830/jhce.v1i1.5791>.
- Mubyarto. (1992). *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media.
- Mudiarta, K. G. (2017). Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. <https://doi.org/10.21082/fae.v27n1.2009.1-12>
- Nugroho, O. T. (1969). *Mubyarto dan Ilmu Ekonomi yang Membumi*. Pusat Studi Pancasila UGM.
- Nugroho, T. (2011). *Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade*. Paper. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM.
- Nurhidayah, D., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(1), 158-169.

- Oka Prasiasa, D. P. (2022). Capitalist Community in Tourism Development: Cultural Study Perspective. *Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts*, 5(1), 44–50. <https://doi.org/10.31091/lekesan.v5i1.1990>
- Özsoy, Ö., & Gürler, M. (2023). *Analyzing the Global Economy in the Post-Pandemic Recovery* (pp. 155–211). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3749-0.ch009>
- Salim, A. (2019). Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.150>
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v2i2.44>
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sultan, & Suryanto. (2023). Kewirausahaan Dalam Perspektif Teori Modal Bourdieu. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i7.111>
- Tarmini, LT. (1992). *Ekonomi Pembangunan*. PAU Studi Ekonomi-UI.
- Tjakrawerdaja, Subiakto., & Soedarno, S. dkk. (2021). Sistem Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Torii, C. V.-. (2015). Reflections on the Development of Responsible Learning by Capitalizing Student-Centered Educational Strategies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 1947–1951. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.565>
- Umam, S. (2017). Ekonomi Pancasila di Tengah Arus Kapitalisme Pasar. *Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.491>
- Vargas-Hernandez, J. G., & Vargas-González, O. C. (2023). *Socio-Economic Sustainability in the Post-Pandemic Era* (pp. 119–137). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7422-8.ch007>
- Zhang, J. Jin, Dong, X., Liu, G. Hui, & Gao, Y. Dong. (2023). Risk and Protective Factors for COVID-19 Morbidity, Severity, and Mortality. In *Clinical Reviews in Allergy and Immunology*. <https://doi.org/10.1007/s12016-022-08921-5>